



**LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI  
DALAM MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024  
Tanggal 16 Agustus – 30 Oktober 2023  
(Masa Sidang Mulai Tanggal 16 Agustus – 3 Oktober 2023  
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 4 Oktober – 30 Oktober 2023)  
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI  
Tanggal 5 Juli 2023**

---

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 adalah sebagai berikut:

**I. FUNGSI LEGISLASI**

Terkait dengan Fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Perlindungan Konsumen Komisi VI DPR RI secara Konsinyering pada tanggal 21-22 September 2023, dalam rangka finalisasi draft RUU tentang Pelindungan Konsumen. Dengan kesimpulan :  
Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI menyepakati akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan :
  - a. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI;
  - b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); dan
  - c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Dalam rangka pendalaman tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing instansi tersebut.

2. Rapat Paripurna tanggal 3 Oktober 2023, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi usul inisiatif DPR RI yang selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah.

## **II. FUNGSI ANGGARAN**

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Fungsi Anggaran diantaranya yakni :

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan Menteri BUMN RI dalam rangka pembahasan mengenai RKAKL TA 2024 (Pagu Anggaran), Pelaksanaan Anggaran s.d Triwulan II TA 2023 dan lain-lain. Adapun kesimpulan rapatnya sebagai berikut:

- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI mengenai Realisasi Anggaran TA 2023 dan Pagu Anggaran TA 2024 Kementerian BUMN.
- 2) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri BUMN RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023 dan Kepala Bappenas Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2024, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp305.661.469.000,- (*Tiga Ratus Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - A. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp208.928.445.000,- (*Dua Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);
  - B. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp96.733.024.000,- (*Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).

- 3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*) yang terdiri dari:
    - A. Pembinaan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp26.526.100.000,- (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah*);
    - B. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana sebesar Rp21.973.900.000,- (*Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
    - C. Publikasi Kinerja Kementerian BUMN dan BUMN sebesar Rp1.500.000.000,- (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
  - 4) Komisi VI mendorong Kementerian BUMN RI untuk meningkatkan realisasi Anggaran TA 2023 mengingat realisasi anggaran Kementerian per Triwulan II 2023 baru sebesar 60,58% dari Total Pagu Anggaran Kementerian sebesar Rp241,5 Miliar.
  - 5) Komisi VI DPR RI bersama dengan Kementerian BUMN RI akan melakukan pembahasan RKA/KL Tahun 2024 kembali sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 4 September 2023 dengan Menteri Perdagangan RI, dalam rangka pembahasan mengenai RKAKL TA 2024 (Pagu Anggaran), Pelaksanaan Anggaran s.d Triwulan II TA 2023 dan rencana perdagangan ratifikasi RI-Chile. Adapun kesimpulan rapatnya sebagai berikut:
- 1) Komisi VI DPR RI dan Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan menyetujui pembahasan Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (*Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement*) untuk Penggabungan Ketentuan-ketentuan Perdagangan Jasa, akan dilaksanakan melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres).

- 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Perdagangan RI mengenai Realisasi Anggaran TA 2023 dan Pagu Anggaran TA 2024 Kementerian Perdagangan RI.
- 3) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri Perdagangan RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-87/MK.02/2023 dan nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2024, Kementerian Perdagangan mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp1.954.667.229.000,- (*Satu Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.361.196.139.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
  - b. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp276.251.304.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah*);
  - c. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp317.219.786.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

- 4) Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk terus berupaya meningkatkan kinerja kementerian agar percepatan realisasi Anggaran TA 2023 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- 5) Komisi VI DPR RI bersama dengan Kementerian Perdagangan RI akan melakukan pembahasan RKA/KL Tahun 2024 kembali sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.

3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 4 September 2023 dengan Menteri Investasi/BKPM RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI dalam rangka pembahasan mengenai RKAKL TA 2024 (Pagu Anggaran), Pelaksanaan Anggaran s.d Triwulan II TA 2023. Adapun kesimpulan rapatnya sebagai berikut:

1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Koperasi dan UKM RI serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI mengenai Realisasi Anggaran TA 2023 dan Pagu Anggaran TA 2024 Kementerian Koperasi dan UKM RI.

2) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri Koperasi dan UKM RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor 626/MK.02/2023 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.497.938.999.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp411.038.534.000,- (Empat Ratus Sebelas Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

2) Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1.086.900.465.000,- (Satu Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI

3) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B-644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.226.376.670.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tiga

Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp416.144.568.000,- (Empat Ratus Enam Belas Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- b. Program Penanaman Modal sebesar Rp810.232.102.000,- (Dedlapan Ratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Rupiah)

Untuk selanjutnya akan dibawa kedalam rapat Badan Anggaran DPR RI

- 4) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk terus berupaya meningkatkan kinerja kementerian agar percepatan realisasi Anggaran TA 2023 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah direncanakan
  - 5) Komisi VI DPR RI Bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Kementerian Investasi/Badan Kordinasi Penanaman Modal RI akan melakukan pembahasan RKA/KL Tahun 2024 kembali sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.
4. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 5 September 2023 dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam rangka pembahasan mengenai RKAKL TA 2024 (Pagu Anggaran), Pelaksanaan Anggaran s.d Triwulan II TA 2023 dan lain-lain. Adapun kesimpulan rapatnya sebagai berikut:
- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), mengenai Realisasi Anggaran sampai

Triwulan II TA 2023 dan Pagu Anggaran TA 2024.

- 2) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2024, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp.228.483.822.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
- a. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp.93.559.866.000,- (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);
  - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.134.923.956.000,- (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

- 3) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2024, Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp.62.306.538.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:

- a. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp.24.663.247.000,- (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.37.673.291.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

- 4) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terkait usulan tambahan pagu anggaran BPKS T.A 2024 sebesar Rp.99.082.550.000,- (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang akan dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis.
- 5) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2024, Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mendapatkan Pagu Anggaran sebesar 2.662.635.880.000,- (*Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp.1.756.121.600.000,- (*Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
  - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.906.514.280.000,- (*Sembilan Ratus Enam Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus*



*Delapan Puluh Ribu Rupiah).*

Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

- 6) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) terkait usulan tambahan pagu anggaran BP Batam T.A 2024 sesuai surat Wakil Kepala BP Batam No. B-248/WK/AL.00.01/7/2023 tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp.850.000.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Miliar) yang akan dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dengan rincian :
  - a. Pembangunan 3000 unit pemukiman sebesar Rp.400.000.000.000,- (*Empat Ratus Miliar Rupiah*).
  - b. Pengembangan jalan sepanjang 16,9 km sebesar Rp.400.000.000.000,- (*Empat Ratus Miliar Rupiah*).
  - c. Pemeliharaan jalan sepanjang 272,16 km sebesar Rp.50.000.000.000,- (*Lima Puluh Miliar Rupiah*).
- 7) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp.115.485.314.000,- (*Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp.23.695.637.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
  - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.91.789.677.000,- (*Sembilan*

*Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)*

Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

- 8) Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 55.988.585.000,- (*Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang akan dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dengan rincian:
  - a. Program Pengawasan Persaingan Usaha diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 39.165.522.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
  - b. Program Dukungan Manajemen diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 16.823.063.000,- (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- 9) Komisi VI DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk terus berupaya meningkatkan kinerja kementerian agar percepatan realisasi Anggaran TA 2023 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- 10) Komisi VI DPR RI bersama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) akan melakukan pembahasan RKA/KL Tahun 2024 kembali sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.

5. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 12 September 2023 dengan Wakil Menteri Perdagangan RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI, dalam rangka pembahasan mengenai penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan lain-lain. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp1.497.938.999.000,- (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Banggar tersebut Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 13 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Banggar.
- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp1.967.270.125.000,- (*Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Banggar tersebut Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Perdagangan RI dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 13 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Banggar.

6. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 13 September 2023 dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, dalam rangka pembahasan mengenai mengenai penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan lain-lain. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat

Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp1.229.295.942.000,- (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

2) Komisi VI DPR RI meminta Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk memberikan perhatian khusus terkait kasus lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan segera mengunjungi lokasi tersebut agar terjadi rekonsiliasi dan mengkomunikasikan kebijakan Pemerintah dengan baik kepada semua pihak yang terkait.

7. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 13 September 2023 dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) dalam rangka pembahasan mengenai mengenai penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan lain-lain. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :

1) Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.230.848.645.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat segera menyampaikan

penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.115.485.314.000,- (*Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
- 3) Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.2.662.635.880.000,- (*Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
- 4) Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.62.306.538.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR

RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

- 5) Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) bersama Kementerian/Lembaga terkait untuk melanjutkan sosialisasi dan komunikasi serta memberikan perhatian kepada para korban terkait permasalahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
8. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 14 September 2023 dengan Menteri BUMN RI, dalam rangka pembahasan mengenai penyesuaian RKA K/L TA 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan lain-lain. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.308.016.126.000,- (*Tiga Ratus Delapan Miliar Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN RI dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 15 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
  - 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI terkait alokasi Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :
    - a. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp.18.600.000.000.000,- (*Delapan Belas Triliun Enam Ratus Miliar Rupiah*) dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap 1 dan penyelesaian Jalan Tol Ruas Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.
    - b. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/*Indonesia Financial*

*Group* sebesar Rp.3.560.000.000.000,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Rupiah*) dalam rangka penyelesaian penyelamatan pemegang polis Jiwasraya.

- c. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp. 6.000.000.000.000,- (*Enam Triliun Rupiah*) dalam rangka penguatan permodalan untuk menunjang kebutuhan modal kerja Proyek Strategis Nasional.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman dengan masing-masing BUMN yang akan menerima alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut.

- 3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI terkait Penyertaan Modal Negara yang berasal dari cadangan investasi Tahun Anggaran 2024 yang akan diprioritaskan kepada BUMN-BUMN sebagai berikut:

- a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka pengadaan kereta.
- b. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) dalam rangka penguatan permodalan.
- c. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) dalam rangka pembelian kapal penumpang angkutan perintis.
- d. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) dalam rangka peningkatan kapasitas produksi.
- e. PT PLN (Persero) sebesar Rp.5.860.000.000.000,- (*Lima Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Miliar Rupiah*) dalam rangka pelaksanaan program elektrifikasi desa.
- f. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID.Food sebesar Rp.832.000.000.000,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah*) dalam rangka pembangunan *cold storage* dan modal kerja.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman dengan masing-masing BUMN yang akan menerima alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari cadangan investasi Tahun Anggaran 2024 tersebut.

9. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 19 September 2023 dengan PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dalam rangka pembahasan mengenai usulan PMN Definitif Tahun 2024 berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2024 dan Rapat dengan Badan Anggaran DPR RI. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Utama Karya (Persero) terkait alokasi Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.18.604.000.000.000,- (*Delapan Belas Triliun Enam Ratus Empat Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan dalam rangka pelaksanaan penugasan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I.
  - b. Penyelesaian Pembangunan Ruas Jalan Tol Kayu Agung – Palembang-Betung dan Ruas Jalan Tol Ciawi-Sukabumi.
- 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. terkait alokasi Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.6.000.000.000.000,- (*Enam Triliun Rupiah*) dalam rangka penguatan permodalan untuk menunjang kebutuhan modal kerja pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- 3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/*Indonesia Financial Group* terkait Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.556.000.000.000,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Rupiah*) dalam rangka penyelesaian penyelamatan pemegang polis Jiwasraya.



- 4) Dengan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2024 tersebut, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/*Indonesia Financial Group* dapat menerima pengalihan seluruh *outstanding* liabilitas polis Jiwasraya yang menyetujui untuk direstrukturisasi dan melaksanakan penyelesaian permasalahan asuransi Jiwasraya secara tuntas.
10. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 19 September 2023 dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PELNI, PT Industri Kereta Api (Persero)/INKA, PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI, dalam rangka pembahasan mengenai usulan PMN Tahun 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi, pembahasan mengenai hutang pemerintah kepada BUMN (PT Pelni). Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) terkait usulan Penyertaan Modal Negara Tahun 2024 yang berasal dari cadangan investasi sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) dalam rangka pembelian 2 unit kapal penumpang untuk menggantikan kapal penumpang yang melewati umur teknis.
  - 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) terkait hutang pemerintah sebesar Rp67.472.406.560,- (*Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*) dari hasil pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Penugasan Public Service Obligation (PSO)/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2022 dan mendorong pemerintah untuk melakukan pelunasan pada tahun 2023.
  - 3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) terkait usulan Penyertaan Modal Negara Tahun 2024 yang berasal dari cadangan investasi sebesar Rp Rp.1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) dalam rangka peningkatan kapasitas produksi yang akan digunakan untuk pengembangan Pabrik Madiun dan Pabrik Banyuwangi.

- 4) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Yang Menggantikan Tugas Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait usulan Penyertaan Modal Negara tahun 2024 yang berasal dari cadangan investasi sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) pada tahun 2024 yang akan digunakan untuk penambahan sarana baru dan peremajaan sarana KRL Jabodetabek.
11. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 20 September 2023 dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ ID FOOD, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dalam rangka pembahasan mengenai usulan PMN Tahun 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi, pembahasan mengenai hutang pemerintah kepada BUMN (PT PLN). Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait usulan PMN dari cadangan investasi TA 2024 sebesar Rp5,86 triliun untuk menjalankan program listrik desa bagia 2.097 desa dengan menggunakan Digital System Planning yang berbasis pada geospasial, sehingga target 100% Rasion Desa Berlistrik (RDB) dan Rsio Elektrifikasi (RE) Desa terutama untuk daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dapat tercapai secara efektif, efesien, bertanggungjawab dan berkeadilan
  - 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait dengan posisi hutang/piutang subsidi listrik dan kompensasi sebesar Rp60,66 triliun dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Subsidi Listrik Tshun 2022 yang telah diaudit BPK dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp4,67 triliun;
    - b. Kekurangan pembayaran subsidi listrik tahun 2023 s.d bulan agustus sebesar Rp5,82 triliun;
    - c. Kompensasi tahun 2023 s.d bulan agustus 2023 sebesar Rp50,16 triliunDengan demikian mendorong pemerintah untuk segera melakukan pelunasan pada tahun 2023.

- 3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD terkait usulan PMN dari cadangan investasi TA 2024 sebesar Rp832 miliar untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan nasional dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pengadaan fasilitas cold storage kapasitas 5000 ton untuk memperpanjang umur simpan cadangan daging ruminansia dan unggas sebesar Rp201 miliar;
  - b. Revitaliasi pabrik dan penguatan rantai pasok tebu Jawa Timur sebesar Rp631 miliar;
- 4) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/Indonesia Re terkait usulan PMN dari cadangan investasi TA 2024 sebesar Rp1 triliun untuk penguatan struktur permodalan dengan cara :
  - a. Pengembangan bisnis secara organik melalui optimalisasi penyerapan bisnis dalam negeri yang profitable dan melakukan ekspansi ke pasar global dengan prinsip kehati-hatian;
  - b. Pengembangan bisnis secara inorganik melalui aksi korporasi (spin-off) dan kerjasama dengan strategic investor.
- 5) Pendalaman dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam RDP dengan PT PLN (Persero), ID Food dan IndonesiaRe menjadi bahan pembahasan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dalam pembahasan alokasi penyertaan modal negara anggaran tahun 2024.

### **III. FUNGSI PENGAWASAN**

Terkait dengan Fungsi Pengawasan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan beberapa kegiatan:

1. Rapat Pimpinan Komisi VI DPR RI pada tanggal 21 Agustus 2023, dalam rangka membahas program kerja Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain.
2. Rapat Internal Komisi VI DPR RI pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam rangka pembahasan program kerja Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain.

## **A. RAPAT KERJA/RDP/RDPU/PANJA KOMISI VI DPR RI**

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja/RDP/RDPU/Panja sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wamen Kartika Wirjoatmodjo pada tanggal 20 September 2023, dalam rangka pembahasan mengenai hutang pemerintah kepada BUMN. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :
  - 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Wakil Menteri BUMN RI terkait Piutang BUMN kepada Pemerintah sebesar Rp 260,8 triliun terhitung hingga 31 Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Energi, Minyak dan Gas sebesar Rp 163,5 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
    - b. Industri Pupuk dan Pangan sebesar Rp 43,7 triliun untuk subsidi dan penyelenggaraan CPP (Cadangan Pangan Pemerintah).
    - c. Asuransi dan Dana Pensiun sebesar Rp 27,7 triliun untuk Program THT dan Subsidi Imbal Jasa Penjamin (IJP) Penjaminan KUR.
    - d. Jasa Logistik sebesar Rp 10,6 triliun untuk Backlog IMO PT KAI (Persero) dan PSO Pelni.
    - e. Jasa Keuangan sebesar Rp 10,25 triliun untuk subsidi bunga KUR
    - f. Jasa Infrastruktur sebesar Rp 4,15 triliun untuk konstruksi dan biaya pembebasan lahan.
    - g. Industri Kesehatan sebesar Rp 0,59 triliun untuk pengadaan vaksin dan pemenuhan pelayanan kesehatan.
    - h. Telekomunikasi dan Danareksa PPA Rp 0,36 triliun untuk penyediaan jasa dan penugasan pemerintah.
  - 2) Komisi VI DPR RI mengusulkan agar dilakukan Rapat Gabungan antara Komisi VI DPR RI dan Komisi IX DPR RI untuk membahas terkait permasalahan pengadaan vaksin dan alat kesehatan lainnya yang berhubungan dengan penanganan Covid-19.

- 3) Komisi VI DPR RI mengusulkan agar dilakukan Rapat Gabungan antara Komisi VI DPR RI dengan Komisi V DPR RI untuk membahas terkait *Backlog* IMO PT KAI (Persero).
  - 4) Komisi VI DPR RI mengusulkan agar dilakukan Rapat Gabungan antara Komisi VI DPR RI dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas terkait *Unfunded Past Services Liabilities* (UPSL) dan reformasi dana pensiun pemerintah.
  - 5) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memberikan penjelasan rinci tentang perhitungan bunga kompensasi piutang BUMN.
  - 6) Komisi VI DPR RI mendukung percepatan pembayaran piutang BUMN kepada pemerintah dari sisa anggaran lebih APBN tahun berjalan.
  - 7) Komisi VI DPR RI meminta setiap penugasan yang diberikan pemerintah kepada BUMN harus berdasarkan dasar hukum secara tertulis dan disertai anggaran yang tertuang di dalam APBN pada tahun penugasan.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/ BKPM RI dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) pada tanggal 2 Oktober 2023, pembahasan mengenai tindak lanjut permasalahan lahan di pulau rempang, batam, kepulauan riau dan lain-lain. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) terkait tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
  - 2) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) agar membuat skema penyelesaian masalah lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau secara menyeluruh yang bisa diterima semua

pihak.

- 3) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dalam melakukan sosialisasi, pendataan dan pendaftaran masyarakat terdampak dilakukan secara humanis, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat pemerintah daerah.
  - 4) Komisi VI DPR meminta Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dalam pelaksanaan implementasi mengundang investor asing ke Indonesia menggunakan azas *equal treatment*.
4. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan sub holding pertamina, PT Pertamina Hulu Energi, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara PT Pertamina Internasional Shipping pada tanggal 26 September 2023, dalam rangka pembahasan mengenai kinerja korporasi sub holding pertamina. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Energi, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara, PT Pertamina Internasional Shipping untuk terus meningkatkan kinerja dengan cara melakukan perbaikan manajemen dan digitalisasi agar mampu bersaing di pasar internasional.
  - 2) Komisi VI DPR RI meminta penjelasan kepada PT Pertamina Hulu Energi terkait dengan langkah-langkah menuju target nasional produksi minyak 1 juta BOPD (*Barrel Oil Per Day*) dan produksi gas 12 BCFD (*Billion Cubic Feet Per Day*) pada tahun 2030 serta mendukung kontribusi PT Pertamina Hulu Energi kepada peningkatan bagian negara, devisa, perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.

- 3) Komisi VI DPR RI mendorong PT Kilang Pertamina Internasional agar dalam meningkatkan kehandalan kilang termasuk peremajaan material dan peralatan, dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Risiko (*Risk Based Inspection*) termasuk penyelesaian kilang-kilang.
  - 4) Komisi VI DPR RI mendorong percepatan pembayaran piutang pemerintah pada PT Pertamina Patra Niaga terkait dana kompensasi, subsidi, dan TNI. Mendukung percepatan penerbitan regulasi terkait segmen pengguna dan alokasi produk JBKP (*Jenis BBM Khusus Penugasan*) Peralite serta perlunya penyesuaian kriteria konsumen pengguna LPG PSO (*Public Service Obligation*) yang dituangkan dalam Revisi Perpres 104/2007.
  - 5) Komisi VI DPR RI mendukung upaya PT Pertamina Gas Negara dalam melaksanakan program pemerintah dan juga menjaga sustainability dengan mendorong pemerintah untuk memberikan insentif yang dibutuhkan selanjutnya Komisi VI DPR RI meminta pemerintah agar memperjelas kompensasi kepada PT Pertamina Gas Negara atas harga gas segmen tertentu.
  - 6) Komisi VI DPR RI mendukung PT Pertamina Internasional Shipping untuk melakukan ekspansi menjadi perusahaan kelas dunia.
5. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BP. Batam pada tanggal 2 Oktober 2023, dalam rangka pembahasan tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain:
- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) terkait tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
  - 2) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP

Batam) agar membuat skema penyelesaian masalah lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau secara menyeluruh yang bisa diterima semua pihak.

- 3) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dalam melakukan sosialisasi, pendataan dan pendaftaran masyarakat terdampak dilakukan secara humanis, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat pemerintah daerah.
- 4) Komisi VI DPR meminta Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dalam pelaksanaan implementasi mengundang investor asing ke Indonesia menggunakan azas *equal treatment*.

6. Rapat Dengar Pendapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) pada tanggal 2 Oktober 2023, dalam rangka pembahasan mengenai sinergitas antar BUMN di sektor energi terkait transisi energi ke listrik. Adapun kesimpulan rapatnya antara lain :

- 1) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait sinergitas antar BUMN di sektor energi terkait transisi energi ke listrik.
- 2) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI mendorong sinergi, koordinasi dan kolaborasi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam mewujudkan transisi energi ke listrik yang lebih cepat dan massive untuk mencapai target yang telah ditentukan.
- 3) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT Pertamina (Persero) untuk :



- a. Melaksanakan transisi energi menuju target Net Zero Emission tahun 2060, dengan tetap memprioritaskan ketahanan dan kemandirian energi nasional, dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.
  - b. Meningkatkan produksi migas, baik domestic dan di luar negeri, untuk mengurangi ketergantungan import, serta memperkuat infrastruktur gas, namun agar dalam operasionalnya dilakukan secara green operation.
  - c. Mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, sehingga tetap menjamin keterjangkauan harga untuk masyarakat.
  - d. Melakukan modernisasi kilang, untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan produk yang lebih rendah emisi.
  - e. Mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel), untuk mengurangi import BBM sekaligus menurunkan emisi karbon.
  - f. Membuka diri dalam kemitraan dengan berbagai pihak, untuk mendukung pencapaian NZE (Net Zero Emission).
- 4) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT PLN (Persero) untuk :
- a. Memastikan pelaksanaan transisi energi menuju target NZE (Net Zero Emission) tahun 2060, dengan tetap memperhatikan ketahanan finansial dan keandalan system.
  - b. Melaksanakan strategi Accelerated Renewable Energy Development yang sudah dirancang PLN untuk membawa Indonesia menjadi percontohan dunia dalam implementasi transisi energi.
  - c. Meningkatkan sinergi antar BUMN dalam melaksanakan transisi energi di berbagai lini, dalam kolaborasi yang saling menguatkan.
  - d. Melaksanakan dan mengembangkan rantai pasok cofiring biomasa untuk pengurangan emisi carbon di sector kelistrikan sekaligus menyerap tenaga kerja dalam ekosistem energi kerakyatan.

- e. Terus menjalankan digitalisasi system kelistrikan, sehingga ke depan dengan transisi energi, maka system kelistrikan PLN lebih siap untuk mengakomodir pasokan EBT skala besar.
- f. Menjadi leading sector pengembangan fasilitas electric vehicles dengan penyediaan pasokan listrik dan kolaborasi bisnis yang terbuka dan fair.
- g. Mempercepat pemenuhan demand kelistrikan di Indonesia yang terus mengalami peningkatan, dengan mengutamakan pasokan EBT.
- h. Mendorong standardisasi baterai untuk mempercepat transisi energi ke listrik di sector transportasi. Sehingga seluruh pengembangan kendaraan listrik dapat diakselerasi pengembangan industry dan produknya.
- i. Mendukung PLN dalam pengembangan skema carbon trading di Indonesia.

**B. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK/KUNJUNGAN KERJA RESES/KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN LUAR NEGERI KOMISI VI DPR RI**

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja antara lain :

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan jalan tol probolinggo banyuwangi (gending) PT Jasa Marga (Persero) beserta Konsorsiumnya ke Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
2. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) ke Provinsi Jawa Barat.
3. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan PT Pelindo di Belawan, Medan ke Provinsi Sumatera Utara.
4. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka dukungan Pelaku UMKM Pariwisata dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Gianyar, Provinsi Bali pada tanggal 4-8 Oktober 2023

5. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka pengembangan Bali maritime tourism hubungan/ pelabuhan Benoa serta ketahanan energi di Badung, Provinsi Bali pada tanggal 4-8 Oktober 2023
6. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka pengembangan pariwisata Provinsi Bali Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 4-8 Oktober 2023

#### IV. **PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024.

Jakarta, 10 Oktober 2023

**KABAGSET KOMISI VI DPR RI,**

**TTD.**

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si**  
**NIP. 19710407 199203 2 001**